

PERAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL DI MASYARAKAT

Robby Nurtresna¹, Mabsuti²

^{1,2}Universitas Primagraha

Email robbynurtresna7@gmail.com ibnumarahas2@gmail.com

ABSTRACT

This journal article explores the role of law in achieving social justice within society. The primary objective of this study is to analyze how legal frameworks and institutions contribute to the realization of social justice, particularly for marginalized communities. Utilizing a doctrinal legal research methodology, the research collects secondary data through literature review and legal documents. The findings indicate that law serves as a crucial instrument for balancing individual freedoms and societal interests, thereby fostering an environment where justice can thrive. However, the study also highlights the challenges faced in the implementation of legal provisions, as many judicial decisions are often perceived as unjust by segments of society. This perception underscores the necessity for a more equitable legal system that genuinely reflects the principles of justice and fairness. In conclusion, the synergy between law and power is essential for promoting social justice. The article advocates for reforms that enhance the legal system's responsiveness to the needs of the community, ensuring that justice is not merely an abstract concept but a tangible reality for all members of society.

ABSTRAK

Artikel jurnal ini mengeksplorasi peran hukum dalam mencapai keadilan sosial dalam masyarakat. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana kerangka hukum dan lembaga berkontribusi pada terwujudnya keadilan sosial, terutama bagi masyarakat yang terpinggirkan. Memanfaatkan metodologi penelitian hukum doktrinal, penelitian ini mengumpulkan data sekunder melalui tinjauan pustaka dan dokumen hukum. Temuan ini menunjukkan bahwa hukum berfungsi sebagai instrumen penting untuk menyeimbangkan kebebasan individu dan kepentingan masyarakat, sehingga menumbuhkan lingkungan di mana keadilan dapat berkembang. Namun, studi ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi dalam penerapan ketentuan hukum, karena banyak keputusan peradilan sering dianggap tidak adil oleh segmen masyarakat. Persepsi ini menggarisbawahi perlunya sistem hukum yang lebih adil yang benar-benar mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan keadilan. Kesimpulannya, sinergi antara hukum dan kekuasaan sangat penting untuk mempromosikan keadilan sosial. Artikel ini mengadvokasi reformasi yang meningkatkan respons sistem hukum terhadap kebutuhan masyarakat, memastikan bahwa keadilan bukan hanya konsep abstrak tetapi realitas nyata bagi semua anggota masyarakat.

PENDAHULUAN

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keadilan merupakan kata sifat yang menjelaskan suatu kata benda atau kata ganti dengan tiga makna. Pertama, memiliki bobot yang sama; tidak condong ke satu sisi; dan tidak memihak. Kedua, mendukung apa yang benar; konsisten dengan kebenaran. Ketiga, dilakukan dengan cara yang benar; tidak sembarangan. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan mencerminkan perlakuan yang adil

terhadap semua individu, tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan istimewa. Oleh karena itu, keadilan bukan hanya sekadar konsep, tetapi juga merupakan prinsip yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk memastikan bahwa Keadilan tersebut harus didapatkan oleh setiap orang tanpa terkecual.¹

Keadilan sosial merupakan salah satu tujuan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama di Indonesia. Di negara ini, keadilan sosial diakui sebagai hak setiap warga negara. Pancasila, sebagai dasar negara, mengatur keadilan sosial, terutama pada sila kelima yang menekankan pentingnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial berarti bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya, berhak mendapatkan hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi yang ada di masyarakat, sehingga setiap orang dapat mencapai kehidupan yang layak dan berkontribusi pada kesejahteraan yang merata di seluruh lapisan masyarakat.

Cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah sesuatu yang harus terus diperjuangkan dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dalam setiap aspek kehidupan, diharapkan masyarakat Indonesia dapat hidup dalam harmoni dan kesejahteraan yang merata. Penerapan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima, menjadi kunci untuk mencapai tujuan ini. Nilai utama yang terkandung dalam Pancasila berlandaskan pada konsep memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara dalam mengembangkan ekonomi pribadi serta memastikan kesetaraan dalam hukum.²

Sila kelima Pancasila, yang berbunyi "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," menekankan pentingnya keadilan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Keadilan sosial tidak hanya berarti memberikan hak yang sama kepada setiap individu, tetapi juga memastikan bahwa setiap orang, terutama yang kurang mampu, mendapatkan akses yang adil terhadap sumber daya dan layanan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Hal ini mencakup upaya untuk mengurangi kesenjangan antara kelompok masyarakat yang kaya dan miskin, serta menciptakan kesempatan yang setara bagi semua orang untuk berpartisipasi dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Dalam konteks ini, keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bangsa mencakup:

a. **Keadilan Distributif**, yaitu keadilan yang berkaitan dengan pembagian sumber daya dan kekayaan dalam masyarakat. Negara wajib memberikan keadilan dalam bentuk pembagian kesejahteraan, subsidi, bantuan, serta kesempatan hidup bersama berdasarkan hak dan kewajiban. Prinsip ini menekankan bahwa setiap orang berhak mendapatkan bagian yang adil dari sumber daya yang ada, berdasarkan kebutuhan dan kontribusi mereka. Keadilan distributif bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, sehingga semua anggota masyarakat dapat menikmati kesejahteraan.

b. **Keadilan Komutatif**, yaitu keadilan yang berhubungan antara individu dalam masyarakat secara timbal balik. Dalam konteks ini, setiap orang harus diperlakukan secara adil dalam interaksi pribadi, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Keadilan komutatif menekankan perlunya keseimbangan dalam transaksi dan hubungan sosial, di mana setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang sama.

c. **Keadilan Legalis**, yaitu keadilan yang berfokus pada penerapan hukum yang adil dan merata. Setiap individu harus mendapatkan perlindungan hukum yang sama tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang. Keadilan ini memastikan bahwa hukum ditegakkan secara konsisten dan tidak diskriminatif, sehingga semua orang merasa aman dan terlindungi.

Konsep keadilan adalah dasar yang sangat penting dalam membangun masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, kita dapat menciptakan lingkungan di mana setiap individu merasa dihargai dan memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang. Keadilan bukan sekadar prinsip hukum, tetapi juga merupakan nilai moral yang perlu dijunjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Keadilan sosial mengacu pada keadilan yang diterapkan dalam masyarakat dalam semua aspek kehidupan, baik yang bersifat material maupun spiritual.³

Pemerintah dan penegak hukum memegang peranan yang sangat krusial dalam mewujudkan keadilan sosial, karena keadilan sosial bukan hanya sekadar konsep, melainkan sebuah cita-cita yang harus diwujudkan melalui tindakan konkret dalam berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Keterlibatan aktif pemerintah dan seluruh masyarakat sangat penting untuk menciptakan keadilan sosial yang nyata, mengingat bahwa mewujudkan keadilan sosial

bukanlah tugas yang mudah. Terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi, seperti korupsi, ketimpangan ekonomi, dan kesenjangan sosial. Keadilan, yang dipandang sebagai fairness menurut Rawls, menuntut seluruh masyarakat untuk bergotong-royong dalam memikul beban kewajiban dan tanggung jawab yang sama, serta mematuhi aturan yang berlaku.⁴

Hukum berfungsi tidak hanya sebagai alat untuk mengatur perilaku individu dan kelompok, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai kesejahteraan serta mengurangi kesenjangan sosial yang ada. Dalam konteks mewujudkan keadilan sosial, hukum memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak individu dan kelompok, serta memastikan bahwa setiap orang menerima perlakuan yang adil di hadapan hukum. Tanpa adanya hukum yang jelas dan diterapkan dengan baik, masyarakat akan kesulitan mencapai keadilan yang sejati. Hukum berfungsi sebagai jaminan bahwa setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi yang sesuai, menciptakan rasa aman dan kepercayaan di masyarakat. Karena sejatinya kemanusiaan dan keadilan merupakan tujuan utama dalam kehidupan hukum kita. Oleh karena itu, kalimat “hukum untuk manusia” juga berarti “hukum untuk keadilan.”⁵

Selain itu, hukum juga berperan dalam mendorong sinergi antara kekuasaan dan masyarakat, yang sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah mendukung keadilan sosial dan tidak mengabaikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Hukum dan kekuasaan tidak bisa dipisahkan, tetapi dapat mencapai tujuan yang sama, yaitu keadilan sosial, jika keduanya dijalankan dengan baik sesuai dengan fungsinya masing-masing.⁶ Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan adanya kerjasama antara pemerintah dan penegak hukum, diharapkan keadilan sosial dapat terwujud secara nyata dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Dalam jurnal ini, akan dibahas lebih lanjut mengenai bagaimana hukum dapat berperan sebagai pilar utama dalam mewujudkan keadilan sosial di masyarakat, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Dengan memahami peran hukum secara mendalam, diharapkan akan ditemukan solusi yang efektif untuk meningkatkan keadilan sosial di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode studi pustaka (Literature Review): Metode ini melibatkan penelusuran dan analisis berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku, artikel jurnal, dan dokumen hukum. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan teori, konsep, dan data yang berkaitan dengan peran hukum dalam keadilan sosial. Dengan melakukan studi pustaka, peneliti dapat memahami konteks hukum yang ada dan bagaimana hukum berinteraksi dengan isu-isu sosial.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Hukum Sebagai Alat untuk Mencapai Keadilan Sosial di Masyarakat

Hukum memainkan peran yang sangat krusial dalam masyarakat, berfungsi sebagai sarana untuk meraih keadilan sosial. Hukum seharusnya tidak hanya berfungsi untuk menjaga ketertiban, tetapi juga untuk memberikan keadilan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, peran para penegak hukum, seperti hakim dan pengacara, sangat penting untuk memastikan penerapan hukum secara adil dan tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, peran hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial cukup kompleks, melibatkan hubungan antara hukum, masyarakat, dan nilai-nilai sosial yang ada. Hukum perlu mampu beradaptasi dan berfungsi sebagai alat untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Selain itu, peraturan perundang-undangan sangat penting dalam mewujudkan keadilan sosial serta mengatur tindakan yang diperbolehkan dan yang dilarang. Pembatasan ini memberikan perlindungan dan menciptakan rasa aman serta nyaman bagi individu. Hukum dirumuskan dengan tujuan atau fungsi tertentu.⁷

Sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Semua warga negara memiliki kedudukan yang setara di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menghormati hukum tersebut tanpa kecuali.” Pasal ini dengan tegas menjelaskan bahwa semua warga negara, baik yang berasal dari suku pribumi maupun non-pribumi, terlepas dari latar belakang pendidikan, apakah mereka terpelajar atau tidak, serta dari status ekonomi, baik golongan menengah ke atas atau mereka yang berjuang melawan kemiskinan, harus mendapatkan pelayanan yang setara di hadapan hukum.

Hal ini berarti bahwa semua warga negara berhak mendapatkan hak-hak yang sama di hadapan hukum, sehingga mereka akan diperlakukan secara adil tanpa memandang status sosial atau ekonomi. Dengan adanya prinsip persamaan ini, tidak ada individu yang berada di atas hukum, dan setiap orang harus mempertanggungjawabkan tindakan mereka di depan hukum. Ini menegaskan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam sistem hukum, yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan beradab, di mana semua orang merasa aman dan terlindungi. Sehingga dapat mencapai keadilan yang bermartabat, keadilan yang memanusiakan manusia.⁸

Dalam konteks ini, penerapan hukum yang adil akan menciptakan kepercayaan di antara warga negara terhadap lembaga hukum dan pemerintahan, sehingga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga dan menegakkan hukum. Dengan demikian, keadilan bukan hanya merupakan hak, tetapi juga tanggung jawab setiap individu untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip ini dihormati dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Ini berarti bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan mendapatkan perlakuan yang adil, sehingga tidak ada individu yang berada di atas hukum saat berhadapan dengan sistem hukum. Hukum memiliki beberapa peran penting dalam mewujudkan keadilan sosial di masyarakat. Berikut adalah penjelasan lebih mendalam mengenai peran-peran tersebut:

1. Penyelesaian Sengketa

Hukum menawarkan mekanisme untuk menyelesaikan konflik dan perselisihan yang muncul di masyarakat. Dengan adanya sistem hukum yang terstruktur, individu dan kelompok dapat mencari keadilan melalui proses yang transparan dan adil. Proses ini mencakup berbagai metode penyelesaian sengketa, seperti mediasi dan arbitrase, yang memfasilitasi pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang dan mahal. Pendekatan ini tidak hanya mempercepat penyelesaian tetapi juga mengurangi beban pada sistem peradilan.

2. Perlindungan Hak

Hukum berperan dalam melindungi hak-hak individu, terutama bagi kelompok yang rentan. Penegakan hukum yang konsisten dan efektif memastikan bahwa setiap pelanggaran hak akan mendapatkan sanksi yang sesuai. Dengan demikian, hukum menciptakan rasa aman

di masyarakat, di mana setiap individu merasa terlindungi dari tindakan sewenang-wenang. Perlindungan ini sangat penting dalam konteks hak asasi manusia, di mana hukum harus mampu memastikan bahwa semua orang diperlakukan dengan adil dan setara.

3. Reformasi Sosial

Hukum dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mendorong perubahan sosial yang positif. Contohnya, undang-undang yang mendukung kesetaraan gender, perlindungan lingkungan, dan hak-hak pekerja berkontribusi pada penciptaan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan. Reformasi hukum ini sering kali mencerminkan perubahan nilai-nilai sosial dan kebutuhan masyarakat, sehingga hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai agen perubahan.

Secara keseluruhan, hukum berfungsi sebagai alat yang sangat penting dalam mencapai keadilan sosial di masyarakat. Hukum tidak hanya mengatur perilaku individu dan kelompok, tetapi juga berperan dalam menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul di antara mereka. Dengan adanya mekanisme hukum yang jelas dan terstruktur, konflik dapat diselesaikan dengan cara yang adil dan transparan, sehingga mencegah terjadinya ketidakpuasan yang dapat mengganggu stabilitas sosial.

Selain itu, hukum berfungsi dalam melakukan rekayasa sosial, di mana undang-undang dapat dirancang untuk menciptakan perubahan positif dalam masyarakat. Contohnya, hukum yang mendukung kesetaraan hak dan perlindungan terhadap kelompok yang rentan dapat membantu mengurangi ketidakadilan dan diskriminasi. Dengan cara ini, hukum tidak hanya sekadar menegakkan aturan, tetapi juga berperan aktif dalam membentuk norma dan nilai yang diinginkan dalam masyarakat.

Selanjutnya, hukum juga berfungsi untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Dengan adanya ancaman sanksi bagi pelanggar hukum, individu cenderung lebih berhati-hati dalam bertindak, yang pada gilirannya dapat mengurangi perilaku menyimpang dan meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat.

Tak kalah pentingnya, hukum memiliki peran dalam mendidik masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka. Melalui penyuluhan hukum dan pendidikan, masyarakat dapat memahami pentingnya menghormati hukum dan norma sosial, sehingga tercipta kesadaran kolektif untuk

mendukung keadilan dan ketertiban. Namun, untuk mencapai tujuan ini, dibutuhkan komitmen dari semua pihak, baik pemerintah, penegak hukum, maupun masyarakat untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan bertanggung jawab. Tanpa dukungan dan partisipasi aktif dari semua elemen tersebut, hukum tidak akan dapat berjalan efektif dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil dan setara bagi semua individu. Oleh karena itu, kolaborasi dan kesadaran bersama sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan sosial yang diharapkan.

B. Tantangan Dalam Menerapkan Hukum untuk Mencapai Keadilan Sosial

Tantangan dalam menerapkan hukum untuk mencapai keadilan sosial di Indonesia sangat rumit dan bervariasi. Salah satu tantangan utama adalah ketidakadilan dalam penegakan hukum, di mana hukum sering kali tampak lebih berpihak kepada mereka yang memiliki kekuatan dan pengaruh. Selain itu, profesionalisme hakim dan aparat penegak hukum yang sering kali tidak memadai turut mengakibatkan keputusan hukum yang tidak konsisten dan tidak adil.⁹ Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius untuk meningkatkan integritas dan profesionalisme dalam sistem peradilan agar keadilan sosial dapat terwujud bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kenyataan ini mengindikasikan bahwa walaupun hukum seharusnya diterapkan kepada semua orang tanpa pengecualian, dalam realitanya orang-orang dari kalangan atas sering kali mampu menghindari akibat hukum, sementara masyarakat kelas bawah harus menghadapi hukuman yang lebih berat untuk pelanggaran yang sama. Peranan hakim dalam menciptakan keadilan dan ketertiban bagi masyarakat sangatlah nyata.¹⁰ situasi seperti ini menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat dan merusak kepercayaan terhadap sistem hukum, yang seharusnya berfungsi untuk melindungi semua lapisan masyarakat secara adil. Ketidakadilan ini tidak hanya merugikan individu yang terlibat, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum dan pemerintah, sehingga mendesak perlunya reformasi dalam penegakan hukum untuk memastikan bahwa semua orang, tanpa memandang status sosialnya, dapat menerima perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Selain itu, kurangnya kesadaran hukum di masyarakat juga menjadi tantangan signifikan. Banyak individu tidak memahami hak-hak mereka atau cara untuk memperjuangkannya, yang

mengakibatkan ketidakadilan dalam akses terhadap keadilan. Misalnya, masyarakat sering kali tidak tahu prosedur hukum yang harus diikuti ketika menghadapi pelanggaran hak, sehingga mereka terjebak dalam ketidakberdayaan. Hal ini diperparah oleh kualitas sistem hukum yang ada, yang sering kali tidak mampu memberikan keadilan yang merata bagi semua lapisan masyarakat. Proses hukum yang panjang, biaya yang tinggi, dan adanya praktik korupsi di kalangan penegak hukum membuat banyak orang enggan untuk mencari keadilan melalui jalur hukum.

Penerapan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima yang menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, sering kali tidak terimplementasi dalam kenyataan. Meskipun Pancasila menggarisbawahi pentingnya keadilan sosial, implementasinya dalam kebijakan dan tindakan hukum masih menghadapi banyak kendala. Banyak kebijakan yang seharusnya mewakili kepentingan rakyat justru menguntungkan segelintir orang, sehingga menciptakan kesenjangan sosial yang lebih besar.

Secara keseluruhan, tantangan dalam menerapkan hukum untuk mencapai keadilan sosial di Indonesia mencakup ketidakadilan dalam penegakan hukum, kurangnya kesadaran hukum, kualitas sistem hukum yang rendah, dan implementasi nilai-nilai Pancasila yang tidak konsisten. Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan upaya kolaboratif dari semua elemen masyarakat, termasuk pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat sipil.

Implementasi hukum untuk mencapai keadilan sosial di masyarakat menghadapi berbagai tantangan yang rumit. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang perlu diperhatikan:

1) Akses terhadap Keadilan

Salah satu tantangan terbesar adalah sulitnya akses keadilan bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Banyak individu, terutama dari kalangan yang kurang mampu, mengalami kesulitan dalam memperoleh bantuan hukum yang memadai. Hal ini disebabkan oleh minimnya informasi mengenai hak-hak mereka dan keterbatasan sumber *dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, Prenadamedia Group, hlm 19. daya untuk menanggung biaya hukum. Tanpa akses yang cukup, mereka tidak dapat memperjuangkan hak-hak mereka di hadapan hukum, yang berisiko memperburuk ketidakadilan sosial.

2) Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah aspek krusial dalam penegakan hukum. Tanpa kepastian, masyarakat akan kesulitan memahami hak dan kewajiban mereka, yang dapat mengakibatkan ketidakadilan. Ketidakpastian ini sering kali disebabkan oleh adanya peraturan yang saling bertentangan atau tidak konsisten, serta kurangnya transparansi dalam proses hukum.

3) Akuntabilitas Penegak Hukum

Akuntabilitas lembaga penegak hukum juga menjadi tantangan penting. Jika penegak hukum tidak bertanggung jawab atas tindakan mereka, maka penerapan hukum dapat menjadi tidak adil dan diskriminatif. Kasus-kasus korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan menghambat upaya untuk mencapai keadilan sosial.

4) Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam proses hukum sangat penting untuk menciptakan keadilan sosial. Namun, sering kali masyarakat tidak terlibat aktif dalam proses hukum, baik karena kurangnya pemahaman tentang hukum maupun ketidakpercayaan terhadap sistem hukum itu sendiri. Meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong partisipasi masyarakat dapat membantu memperkuat penegakan hukum dan memastikan bahwa suara masyarakat didengar.

Partisipasi masyarakat dalam hukum bukan hanya sekadar hak, tetapi juga merupakan bagian penting dari proses demokrasi yang sehat. Ketika masyarakat terlibat dalam pembuatan dan penegakan hukum, mereka dapat menyuarakan kepentingan dan kebutuhan mereka. Hal ini menciptakan ruang dialog yang konstruktif antara pemerintah dan warga, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap realitas sosial.

Lebih dari itu, partisipasi masyarakat berkontribusi pada penguatan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan. Dengan keterlibatan aktif, masyarakat dapat mengawasi tindakan pemerintah dan lembaga penegak hukum, memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan merata. Ini juga membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan, yang sering kali mengakibatkan ketidakadilan.

Kemudian partisipasi masyarakat dalam hukum berfungsi untuk mendidik masyarakat

tentang hak dan kewajiban mereka. Dengan memahami sistem hukum, warga dapat lebih aktif dalam memperjuangkan hak-hak mereka dan berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih adil. Melalui partisipasi, nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial dapat dipupuk, menciptakan masyarakat yang lebih beradab, di mana setiap individu merasa dihargai dan memiliki suara dalam proses pengambilan keputusan.

Dengan demikian, partisipasi masyarakat bukan hanya sebuah hak, tetapi merupakan fondasi penting untuk membangun masyarakat yang lebih harmonis dan berkeadilan. Dengan meningkatkan akses terhadap keadilan, memastikan kepastian hukum, dan mendorong partisipasi masyarakat, diharapkan hukum dapat berfungsi sebagai alat yang efektif dalam mencapai keadilan sosial yang diinginkan.

C. Pemerintah dan Lembaga Penegak Hukum Berperan Dalam Mencapai Keadilan Sosial

Pemerintah dan lembaga penegak hukum memiliki peranan yang saling melengkapi dalam mencapai keadilan sosial. Disisi lain Pemerintah bertugas menciptakan kebijakan yang menjamin hak-hak masyarakat, serta memastikan bahwa semua warga negara, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi, mendapatkan akses yang sama terhadap keadilan. Dalam hal ini, pemerintah berfungsi sebagai fasilitator yang mengatur dan melindungi hak-hak individu.

Di sisi lain, lembaga penegak hukum adalah eksekutor dari kebijakan tersebut. Mereka bertanggung jawab untuk menerapkan hukum dengan adil dan tanpa keberpihakan. Dengan demikian, efektivitas lembaga-lembaga ini sangat menentukan sejauh mana keadilan sosial dapat terwujud di masyarakat. Penegakan hukum yang transparan dan akuntabel dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Pemerintah berupaya mewujudkan keadilan sosial melalui berbagai langkah strategis yang komprehensif dan terencana. Langkah-langkah ini mencakup penyusunan kebijakan yang inklusif dan adil, yang dirancang untuk mengatasi berbagai ketidaksetaraan yang ada dalam masyarakat. Selain itu, penegakan hukum yang tegas dan transparan menjadi salah satu pilar utama dalam memastikan bahwa setiap individu diperlakukan secara adil di hadapan hukum, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi mereka.

Pemberdayaan masyarakat juga menjadi fokus penting dalam upaya ini. Melalui program

pendidikan dan pelatihan, pemerintah berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka serta memberikan kemampuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Dengan melibatkan masyarakat dalam dialog dan proses hukum, diharapkan tercipta lingkungan yang mendukung keadilan sosial yang nyata dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, dengan mengintegrasikan ketiga langkah strategis ini penyusunan kebijakan, penegakan hukum, dan pemberdayaan masyarakat pemerintah berkomitmen untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan harmonis bagi semua. Salah satu metode utama adalah dengan merancang kebijakan yang adil dan merata untuk seluruh rakyat Indonesia, yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Dalam hal ini, pemerintah berfungsi sebagai pengatur yang memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa memandang status sosial atau ekonomi, memiliki akses yang setara terhadap sumber daya dan layanan publik.

Selain itu, pemerintah juga berusaha meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja bagi seluruh masyarakat. Ini mencakup pengembangan sektor ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yang diharapkan dapat memberdayakan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai pengatur, tetapi juga sebagai fasilitator yang menciptakan suasana yang mendukung tercapainya keadilan sosial.

Pemerintah dan lembaga penegak hukum memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan keadilan sosial di masyarakat. Mereka bertanggung jawab untuk menciptakan dan menjaga lingkungan yang adil, di mana setiap individu dapat merasakan perlindungan hukum dan hak-haknya dihormati. Dalam konteks ini, pemerintah harus memastikan bahwa undang-undang yang ada tidak hanya bersifat formal, tetapi juga dapat diimplementasikan secara efektif untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Selain itu, lembaga penegak hukum harus berfungsi sebagai garda terdepan dalam menegakkan hukum dengan integritas dan profesionalisme. Mereka perlu berkomitmen untuk menangani setiap kasus dengan adil, tanpa memandang status sosial atau ekonomi pelanggar. Dengan demikian, kehadiran pemerintah dan lembaga penegak hukum yang

responsif dan bertanggung jawab sangatlah krusial untuk menciptakan keadilan sosial yang nyata, di mana semua warga negara merasa aman dan terlindungi dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Melalui kolaborasi yang baik antara pemerintah dan lembaga penegak hukum, serta partisipasi aktif masyarakat, diharapkan keadilan sosial dapat terwujud secara berkelanjutan, memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Berikut adalah beberapa langkah strategis yang dapat diambil:

- a. Memastikan bahwa semua lapisan masyarakat terutama yang kurang mampu, memiliki akses yang sama terhadap layanan hukum adalah langkah krusial dalam mewujudkan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah perlu mengimplementasikan berbagai inisiatif yang dapat membantu masyarakat memahami dan memanfaatkan hak-hak hukum mereka. Salah satu cara yang efektif adalah dengan menyediakan bantuan hukum gratis atau subsidi bagi mereka yang membutuhkan, sehingga tidak ada individu yang terhambat untuk mencari keadilan hanya karena keterbatasan finansial. Pemerintah juga dapat bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah dan lembaga bantuan hukum untuk memperluas jangkauan layanan ini.
- b. Pemerintah perlu mengadakan program pendidikan dan sosialisasi yang menyeluruh mengenai hak-hak hukum dan keadilan sosial. Upaya ini sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang mendalam tentang hak-hak mereka serta tanggung jawab dalam menegakkan keadilan. Program-program tersebut dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti seminar, lokakarya, dan kampanye informasi yang melibatkan media sosial, agar informasi dapat menjangkau lebih banyak orang.
- c. Melakukan reformasi dan peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum agar lebih profesional dan responsif sangat penting untuk menciptakan sistem hukum yang efektif dan dapat diandalkan. Upaya ini harus mencakup berbagai aspek, seperti penyediaan pelatihan yang berkelanjutan bagi aparat penegak hukum dalam hal etika, hak asasi manusia, dan penanganan kasus secara adil. Pelatihan etika akan membantu aparat memahami pentingnya integritas dan kejujuran dalam menjalankan tugas mereka, sehingga mereka dapat bertindak dengan cara yang mencerminkan nilai-nilai keadilan.

Sementara itu, pemahaman tentang hak asasi manusia sangat penting untuk memastikan bahwa setiap individu diperlakukan dengan hormat dan tidak mengalami diskriminasi dalam proses hukum.

d. Membangun kemitraan yang kuat antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil merupakan langkah strategis dalam menciptakan sistem hukum yang lebih efektif dan responsif. Kerja sama ini tidak hanya memperkuat hubungan antara berbagai pihak, tetapi juga menciptakan saluran komunikasi yang lebih baik untuk pertukaran informasi dan ide. Dengan membangun jaringan yang solid, diharapkan semua pihak dapat saling mendukung dan berkolaborasi dalam upaya penegakan hukum.

Melalui kolaborasi ini, masyarakat dapat lebih aktif terlibat dalam proses pengawasan dan penegakan hukum, sehingga mereka memiliki suara dalam menentukan kebijakan yang berdampak pada kehidupan mereka. Keterlibatan masyarakat dalam forum-forum diskusi dan pertemuan rutin dengan lembaga penegak hukum akan memberikan ruang bagi mereka untuk menyampaikan pendapat, mengungkapkan aspirasi, serta melaporkan pelanggaran yang terjadi di komunitas mereka. Dengan melaksanakan penegakan hukum yang sesuai dengan aturan yang responsif, maka sistem negara hukum di Indonesia akan dapat terwujud.¹¹

Keterlibatan masyarakat dalam proses penegakan hukum juga sangat penting untuk mendorong keadilan sosial. Dengan meningkatkan kesadaran hukum dan memberikan pendidikan kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka, diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam melaporkan pelanggaran dan menuntut keadilan. Secara keseluruhan, untuk membangun masyarakat yang adil dan sejahtera, diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat. Hanya melalui cara ini, keadilan sosial dapat terwujud dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Partisipasi masyarakat juga sangat ditekankan dalam usaha mencapai keadilan sosial. Pemerintah perlu memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dan evaluasi kebijakan publik. Dengan melibatkan masyarakat, diharapkan kebijakan yang ditetapkan dapat lebih mencerminkan kebutuhan dan aspirasi rakyat, sehingga keadilan sosial dapat terwujud secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

KESIMPULAN

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran hukum dalam mewujudkan keadilan sosial di masyarakat sangat penting dalam menciptakan keadilan sosial. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menegakkan ketertiban, tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan hak dan perlindungan yang setara di hadapan hukum. Keadilan sosial diharapkan dapat terwujud melalui penerapan hukum yang adil dan merata, yang mampu mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Namun, realitas menunjukkan bahwa seringkali terdapat ketidakadilan dalam penerapan hukum. Banyak keputusan hukum yang dianggap tidak adil oleh masyarakat, yang menciptakan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, penting bagi hukum untuk tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif, dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. F. (2021). *Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila*. Justitia Et Pax, 37(1).
- Arliman, L. (2019). *Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia*. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 11(1), 1-20.
- Azharie, A. (2023). *Pemanfaatan Hukum sebagai Sarana untuk Mencapai Keadilan Sosial*. *Lex Aeterna Law Journal*, 1(2), 72-90.
- Junaidi, J. (2021). *Sinergi Hukum Dan Kekuasaan Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial*. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 30(1), 17-27.
- Purwanto, P. (2017). *Perwujudan Keadilan dan Keadilan Sosial dalam Negara Hukum Indonesia: Perjuangan yang Tidak Mudah Dioperasionalkan*. *Jurnal Hukum Media Bhakti*.
- Rohmat, R., Dewi, I.K., Riyadi, T.M., & Parhan, M. (2024). Tinjauan Pelaksanaan Aborsi bagi Korban Pelecehan Seksual Sedarah dalam Perspektif Islam dan Kenegaraan. *Pikukuh: Jurnal Hukum dan Kearifan Lokal*. 1(1). 1-19. DOI: <http://dx.doi.org/10.62870/pkh.v1i1.22748>
- Rumadan, I. (2017). *Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian*. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), 69-87.
- Sumirat, I. R. (2020). *Penegakan Hukum Dan Keadilan Dalam Bingkai Moralitas Hukum*. *Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik*, 11(2), 86-100.
- Susdarwono, E.T., & Wiranta, Alma. (2024). Pengaruh Tingkat Demokrasi (Tipe Rezim) Suatu Negara terhadap Anggaran Pertahanan. *Pikukuh: Jurnal Hukum dan Kearifan Lokal*. 1(1).

- 20-35. DOI. <http://dx.doi.org/10.62870/pkh.v1i1.22772>
- Syahriar, I., Bazarah, J., & Khairunnisah, K. (2024). *Keadilan Sosial di dalam Negara Hukum Indonesia*. Journal of Knowledge and Collaboration, 1(2), 28-38.
- Triyudiana, A., & Neneng, P. (2024). *Penerapan Prinsip Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Di Indonesia Sebagai Perwujudan Dari Pancasila*. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat, 2(01).
- Yanto, O., & SH, M. (2020). *Negara hukum kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum*. Edited by, 1.
- Gultom, B. M., & SH, S. (2017). *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Efendi, J. (2018). *Rekonstruksi dasar pertimbangan hukum hakim: Berbasis nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*. Depok: Prenadamedia Group.
- Prasetyo, Teguh. (2018). *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Yanto, Dr. Oksidelfa. (2024). *NEGARA HUKUM: KEPASTIAN, KEADILAN DAN KEMANFAATAN HUKUM (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*. Bandung: Penerbit Pustaka Reka Cipta.